



Anggaran Siluman DPRD DKI Rp 12,1 Triliun Ahok Ancam Lapori Ke Polisi

JAKARTA (Pos kota) – Gubernur DKI Ahok mengancam melaporkan DPRD terkait anggaran siluman Rp12,1 triliun dalam APBD DKI 2015 ke aparat hukum. Kejaksaan Agung dan Polri menyatakan siap menindaklanjuti.

"Saya akan melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oknum DPRD yang diketahui menyelipkan anggaran siluman dalam APBD 2015. Karena APBD yang diinginkan legislatif dan eksekutif berbeda," tegasnya, kemarin.

"Biar publik tahu siapa sebenarnya yang salah. Saya atau mereka yang masuk penjara," tandasnya.

Menanggapi hal ini, Inggard Joshua, anggota DPRD, mendukung langkah Ahok tersebut. Palsalnya, bakal membuka tabir siapa yang benar dan siapa yang salah. "Biar terang benderang. Silakan melalui jalur hukum. Jadi warga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.

Inggard mengungkapkan hak angket yang diajukan DPRD digulirkan untuk menyelidiki permasalahan APBD. Tidak mengarah pada pemakzulan terhadap Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta. "Ini merupakan bagian hak dari legislatif. Ini hal yang biasa," ujarnya.

RAPAT PARIPURNA

Hak angket yang digulirkan Kamis (26/2) telah disetujui sembilan fraksi di DPRD. Melalui rapat paripurna, 106 anggota menyatakan setuju dilakukannya hak penyelidikan tersebut.

"Seluruh anggota dari sembilan fraksi sepakat untuk membentuk panitia angket guna menyelidiki dugaan pelanggaran proses APBD 2015," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat memimpin Sidang Paripurna Usulan Hak Angket.

Selama sidang paripurna, juru bicara dari sembilan fraksi diminta ke podium untuk menyampaikan pendapat. Semuanya sepa-

kat untuk menggunakan angket.

BELUM TERIMA LAPORAN

Di tempat terpisah, rencana Ahok melaporkan adanya kecurangan dalam APBD disambut pihak Kejaksaan Agung. "Tentu saja, bila ada laporan akan kami tindaklanjuti. Tapi kami sampai sekarang belum terima ada laporan itu," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampid-sus) R. Widyo Pramono.

Hal yang sama juga disampaikan Kabag Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikhwanto. "Sampai saat ini belum ada laporan. Kalaupun ada sudah sepantasnya kami tindaklanjutinya. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk melapor," tandasnya. (guruh/joko/ahi/m1/st/o)